



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
**UNIT KERJA** : INSPEKTORAT JENDERAL

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : Jujun Endah Wahjuningrum
2. Jabatan : INSPEKTUR
3. NHK : 192357

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 6.365.000.000

1. Tanah Seluas 966 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
2. Tanah Seluas 520 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/100 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.950.000.000
4. Tanah Seluas 155 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 550.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 152 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.650.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 7 m2/26 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 761.000.000
7. Tanah Seluas 153 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.014.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 37.000.000

1. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000
2. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 27.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ---

**D. SURAT BERHARGA** Rp. 1.156.040.839

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 684.780.593



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	8.242.821.432
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	8.242.821.432

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.